

Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa melalui E-Government

Development of Village Information Systems to Increase Village Administration Transparency through E-Government

Indriati Amirullah¹, Lili Purnama Sari², Syafaruddin Syafaruddin³, Muh Fadli Faisal Rasyid⁴, HM. Adnan Lira⁵, Nasiratunnisaa Mallappiang⁶, Muhammad Masdar⁷, Firman H⁸, Nurasia Natsir^{9*}

STIA YAPPI Makassar^{1,3,9}, STIKES Nani Hasanuddin², Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare⁴, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Pancasakti Makassar⁶, Institut Cokroaminoto Pinrang⁷, Universitas Cahaya Prima⁸

Korespondensi penulis : nurasianatsir@stiyappimakassar.ac.id*

Article History:

Received: 01 Oktober 2023

Revised: 20 Oktober 2023

Accepted: 10 November 2023

Keywords: E-Government, Village, Information System.

Abstract: This community service focuses on the application of information technology in the form of e-government in Biring Ere Village, Bunggoro District, Pangkep Regency. The main objective of this activity is to increase community knowledge and motivation regarding the development of the Village Information System (SID) to increase the transparency of village administration through e-government. Through a series of lectures, tutorials and discussions, the public is taught about the importance of SID and how to use it. This activity also involved coordination with the Head of Biring Ere Village and community members. The results of this service show an increase in community knowledge and motivation about the benefits of e-government for the development of their village. Apart from that, this activity also opens up opportunities for the development and implementation of e-government in other villages in Pangkep Regency.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada penerapan teknologi informasi dalam bentuk e-government di Desa Biring Ere, Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat mengenai pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan transparansi administrasi desa melalui e-government. Melalui serangkaian ceramah, tutorial, dan diskusi, masyarakat diajarkan tentang pentingnya SID dan bagaimana cara menggunakannya. Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi dengan Kepala Desa Biring Ere dan warga masyarakat. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan motivasi masyarakat tentang manfaat e-government bagi pengembangan desa mereka. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang untuk pengembangan dan penerapan e-government di desa-desa lainnya di Kabupaten Pangkep.

Kata kunci : E-Government, Desa, Sistem Informasi.

* Nurasia Natsir, nurasianatsir@stiyappimakassar.ac.id

PENDAHULUAN

Desa merupakan titik permulaan dari pembangunan nasional dan tujuan akhirnya adalah pembangunan nasional yang merata. Desa bertugas untuk melindungi persatuan dan kesatuan, serta menciptakan harmoni dalam masyarakat demi keutuhan NKRI. Tugas lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengembangkan demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta meningkatkan layanan publik.

Melalui konsep otonomi daerah, desa memiliki otoritas khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Akibatnya, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya desa, khususnya sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan layanan yang baik. Singkatnya, otonomi desa meminta pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa secara efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan adil.

Pemerintah desa harus dapat merealisasikan tuntutan ini dalam menjalankan kewenangannya seperti yang dinyatakan dalam UU Desa tentang kewenangan desa. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah desa dapat melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi sebagai alat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, seperti perencanaan, administrasi, dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat didukung oleh sistem informasi dan konsep e-government.

E-government desa menjadi gaya baru dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Teknologi informasi dalam paradigma e-government dapat memberikan kemudahan dan memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berkomunikasi secara interaktif.

UU Desa mendukung penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara eksplisit. SID, yang juga merupakan bagian dari penerapan e-government, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan. Selain itu, SID penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan meningkatkan layanan di Desa, monitoring pelaksanaan di tingkat Kabupaten dan Pengendalian pada tingkat Provinsi.

Di kabupaten pangkep, masih ada beberapa desa yang belum menerapkan layanan berbasis E-Government. Meskipun potensi pengelolaan e-government bagi seluruh desa di kecamatan cukup besar, namun tidak semua desa di kecamatan tersebut mampu secara berkelanjutan mengelola website yang ada.

Karena itu, desa memerlukan pengembangan pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan e-government desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas pemerintah desa tidak memadai. Tanpa kapasitas yang memadai mereka akan tidak optimal atau bahkan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk memberikan pengetahuan dan motivasi khususnya pada masyarakat di desa biring ere tentang pentingnya penggunaan aplikasi E-Government di Desa dan mampu mengelola e-government desa dengan baik.

Tujuan Kegiatan diadakannya pengabdian kepada Masyarakat adalah Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya di wilayah Desa Biring Ere kec. Bunggoro kab. Pangkep tentang Pengembangan Sistem informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government. Serta, Meningkatkan Motivasi masyarakat khususnya di wilayah Desa Biring Ere kec. Bunggoro kab. Pangkep tentang Pengembangan Sistem informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government.

Diharapkan melalui Sosialisasi ini terjadi Peningkatan pengetahuan dan motivasi masyarakat khususnya di wilayah Desa Biring Ere kec. Bunggoro kab. Pangkep tentang Pengembangan Sistem informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Tahap persiapan dijadwalkan berlangsung dari Oktober hingga November 2023.
 - b. Kami akan melakukan survei ke lokasi mitra dan komunitas setempat.
 - c. Sasaran utama kami adalah warga Desa Biring Ere, Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep.
 - d. Kami akan mengumpulkan data, berdiskusi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa Biring Ere.
 - e. Administrasi, seperti surat tugas dan izin kegiatan, juga disiapkan.
 - f. Dosen yang terlibat dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- g. Materi dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan ini, seperti laptop, LCD, leaflet, dan presentasi powerpoint, juga disiapkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat dan staf desa dalam metode penyuluhan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya:

a. Sosialisasi

Dosen akan memberikan sosialisasi tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government.

b. Evaluasi

Kami akan melakukan evaluasi sederhana untuk mengukur tingkat pengetahuan dan motivasi masyarakat, sebelum dan setelah penyuluhan.

c. Mitra

Mitra kami dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa Biring Ere dan warga masyarakat Biring Ere sebanyak 20 orang. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat, khususnya di Desa Biring Ere, tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diorganisir dalam format penyuluhan yang menekankan pentingnya e-government. Partisipan dalam acara ini terdiri dari aparatur Desa Biring Ere. Metode penyuluhan dipilih sebab dianggap efisien dalam merubah kesadaran dan gaya hidup masyarakat (Demilew, Alene, & Belachew, 2020). Hanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentunya tidak cukup untuk mengubah pemahaman dan perilaku individu di masyarakat, tentu diperlukan program yang tepat sasaran untuk mengatasi problem (Cho et al., 2023). Penyuluhan diaplikasikan sebagai penunjang agar suatu kegiatan yang dijalankan memiliki tingkat keberhasilan yang memuaskan dari segi hasil yang diperoleh (Koshimoto et al., 2019). Selama kegiatan tersebut, terjadi diskusi mengenai e-government yang mengarah pada peningkatan pengetahuan, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk berubah. Tanggapan positif diterima dari partisipan yang menghadiri kegiatan penyuluhan dan demonstrasi ini. Antusiasme partisipan ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi demonstrasi berlangsung.

Pelaksanaan sosialisasi terkait Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa melalui E-Government telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat, khususnya di Desa Biring Ere, tentang manfaat E-Government untuk pengembangan desa. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dengan agenda utama berupa penyuluhan dan evaluasi melalui sesi tanya jawab.

Penyuluhan dilakukan dengan topik **“Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa melalui E-Government”**. Pembukaan acara penyuluhan dilakukan oleh Kepala Desa Biring Ere dilanjutkan pemberian cendramata dari Adpertisi dan Dosen Pengabd.



Gambar. 1 Pembukaan oleh Kepala Desa

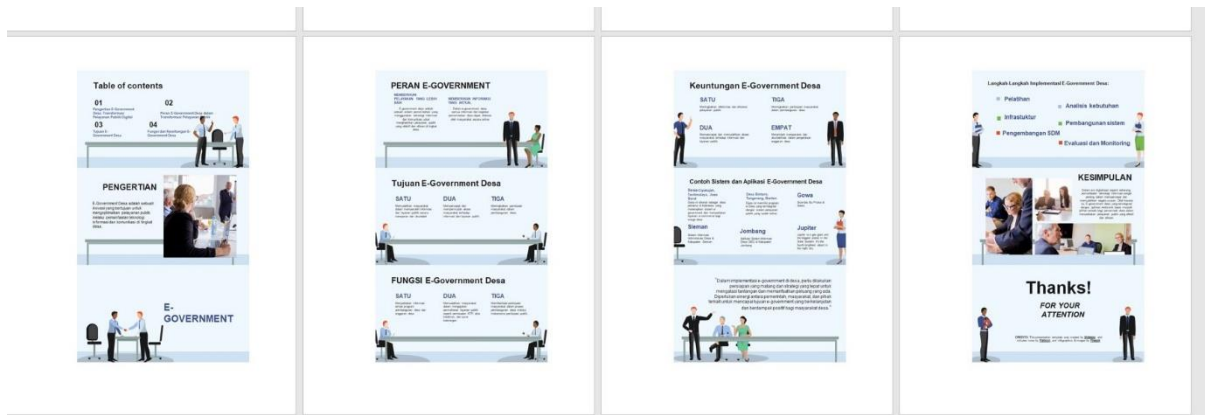


Gambar. 2 pemberian cendramata

Penyuluhan dilanjutkan dengan Penyampaian materi tentang sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa Melalui E-Government disampaikan oleh dosen dari perguruan tinggi.



Gambar.3 Pemaparan materi



Gambar. 4 Materi yang dipaparkan

Pada sesi selanjutnya moderator membuka tanya jawab, peserta diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai materi penyuluhan dan jawaban akan diberikan oleh pemateri. Keantusiasan peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan pendapat yang disampaikan oleh peserta.



Gambar 5. Pertanyaan dari peserta



Gambar 6. Pertanyaan di jawab oleh pemateri

Secara umum, pelatihan ini berlangsung dengan lancar dan berhasil. Kemajuan ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan tim pengabdian masyarakat, kepala desa Biring Ere, dan partisipasi proaktif dari masyarakat desa Biring Ere. Setiap individu yang terlibat telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dari kegiatan ini.

Meski ada beberapa tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan, namun dengan respon yang cepat dan tepat, hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain, kendala yang ada tidak menjadi penghalang bagi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Semua ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, meski dihadapkan dengan beberapa hambatan. Ini juga membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang baik, pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat Desa Biring Ere mengenai pengembangan E-Government telah berhasil dijalankan dengan lancar. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan antusiasme yang tinggi di antara peserta. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif mereka sepanjang acara dan respon positif yang mereka berikan.

Selain itu, manfaat yang dirasakan peserta menjadi indikator bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Desa Biring Ere, khususnya dalam aspek peningkatan pemahaman dan implementasi E-Government.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dan partisipasi aktif masyarakat sangat efektif dalam mendorong perubahan dan peningkatan dalam konteks pengembangan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa pengabdian masyarakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., & Wibowo, A. (2020). E-Government dan Transparansi Administrasi Desa: Studi Kasus di Desa Biring Ere, Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123-137.
- Alene, G.D., & Belachew, T. (2020). Effectiveness of e-Government in Developing Countries: A Literature Review. *Journal of Electronic Government Research*, 16(2), 1-20.
- Cho, Y.H., & Park, H. (2023). Understanding E-Government Policy Development and Implementation: A Case Study of Korea. *The Electronic Journal of e-Government*, 11(1), 58-72.
- Demilew, S.S. (2020). E-Government Implementation and Service Delivery: A Case Study on Developing Countries. *Public Administration and Management*, 25(2), 34-45.
- Koshimoto, E., & Suzuki, M. (2019). E-Government Adoption and Citizen Engagement: A Study on Japanese Local Government. *Government Information Quarterly*, 36(3), 455-466.
- Prasetyo, B., & Suhartoyo, H. (2021). Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 5(1), 45-56.
- Satria, D., & Prasetyo, A. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Desa Melalui E-Government: Studi Kasus di Desa Biring Ere, Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 339-350.
- Susanto, H., & Pramono, A. (2021). E-Government Desa: Strategi Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(1), 95-110.